

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan faktor-faktor seperti *good governance*, sistem pengendalian internal, dan kejelasan sasaran anggaran yang selanjutnya akan dilakukan uji pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Samosir. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah seluruh pejabat berpangkat Eselon II dan Eselon III pada 32 SKPD di Kabupaten Samosir, dan penelitian ini memperoleh data sampel sejumlah 140 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Good Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Samosir. Hal ini berarti semakin baik penerapan *good governance* di instansi pemerintah daerah maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publiknya kepada masyarakat.
2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Samosir. Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah daerah maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan laporan keuangannya yang akan memberikan kepastian yang layak dalam

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah di Kabupaten Samosir.

3. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Samosir. Hal ini dikarenakan hasil yang belum konsisten yang menandakan bahwa masih terdapat sasaran anggaran yang belum jelas yang mungkin disebabkan oleh pelaksana anggaran tidak atau belum termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan sehingga terjadinya penurunan dalam akuntabilitas kinerjanya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian dan dua hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa *good governance*, dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sedangkan satu hipotesis ditolak. Walaupun demikian, tetap masih terjadi permasalahan seperti yang telah disebutkan pada latar belakang yaitu penyalahgunaan kekuasaan berupa kasus pungli oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan dan kasus Korupsi oleh mantan Sekretaris Daerah yang mengakibatkan kerugian kepada negara dan masyarakat. Hal ini mungkin terjadi diakibatkan oleh faktor seperti kurangnya transparansi pada setiap keputusan oleh pemerintah yang seharusnya menyediakan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik, terbukti seperti pengeluaran dana siaga darurat *covid-19* yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh mantan Sekda Samosir. Ini dapat menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan

mempengaruhi nilai SAKIP yang akan mempersulit Kabupaten Samosir untuk memperoleh nilai A untuk tahun ke depannya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah dalam proses pengumpulan data di mana tiap SKPD tidak berlokasi di satu tempat, melainkan menyebar di beberapa lokasi yang jaraknya cukup jauh, belum lagi dikarenakan akses jalan yang belum memadai di beberapa kecamatan. Peneliti juga mengalami kesulitan dalam menghubungi pejabat eselon yang punya banyak kesibukan atau sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya terutama yang ingin melakukan penelitian serupa agar dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, serta dapat mengambil sampel yang lebih banyak dari penelitian ini.
2. Saran kepada pihak instansi pemerintah daerah sekiranya penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan kejelasan sasaran anggaran untuk memperjelas penetapan tujuan anggaran agar mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan

perbaikan secara terus menerus dalam hal transparansi dan tanggung jawab pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan penting bagi pengelola dan pelaksana anggaran di tiap SKPD di Kabupaten Samosir bahwa *good governance*, sistem pengendalian internal bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Diharapkan juga melalui penelitian ini dapat memotivasi tiap SKPD di Kabupaten Samosir agar bisa meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya sehingga target opini wajar tanpa pengecualian bisa tercapai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, (2002). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Edisi Kedua Belas Jilid I*. Jakarta : Penerbit Airlangga.
- Christy, I. S. L. (2020). *Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta)*. Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory* (7th Edition). Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Hartono, J. (2013). *Teori Portfolio dan Analisis Investasi* (Edisi 8). Yogyakarta, Indonesia: BPFU UGM.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang: Penerbit Airlangga
- Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 308-310.
- Kenis. (1979). *Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitude and Performance, The Accounting Review*. Vol. LIV No. 4. pp 707.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- KPK. (2008). *Kependudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance*. Jakarta
- Lohman. (2003). *Analisis Kuantitatif*. Yogyakarta : Andi
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. (2006). “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Governance*”. Yogyakarta : Andi
- _____. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Merdeka. (2021, Februari 17). *Sekda dan Plt Kadis Perhubungan Samo* (Wibowo, 2013) *sir Jadi Tersangka Korupsi Bansos Covid-19*. Diambil kembali dari : <https://www.merdeka.com/peristiwa/sekda-dan-plt-kadis-perhubungan-samosir-jadi-tersangka-korupsi-bansos-covid-19.html>
- Metro24jam. (2021, Juni 19). *Oknum Mantan Kadis Pendidikan Samosir Diduga Pungli dengan Dalih Uang Cinderamata*. Diambil kembali dari : <https://news.metro24jam.com/read/2021/06/19/107484/oknum-mantan-kadis-pendidikan-samosir-diduga-pungli-dengan-dalih-uang-cinderamata>
- Noerdiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Samosir, T. K. J. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Silalahi, E. B. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Tamba, D. P. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun*. Tesis, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wibowo, (2013). *Manajemen Kinerja Edisi Keempat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- World Bank, (1992). *Governance and development*. Washington: The World Bank.